

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Solopos

Wilayah: Kabupaten Kudus

Kudus Raih WTP 9 Kali Beruntun, Bupati Minta ASN Upgrade Kualitas

https://www.solopos.com/kudus-raih-wtp-9-kali-beruntun-bupati-minta-asn-upgrade-kualitas-1127057?utm_source=headline_desktop

Pemerintah Kabupaten Kudus kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jateng.

Solopos.com, KUDUS -- Pemerintah Kabupaten Kudus kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Jateng. Opini WTP ini merupakan raihan kali ke sembilan tanpa jeda.

Mengutip *Kudusnews.com*, Minggu (23/5/2021), Opini WTP ini merupakan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Opini WTP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jateng Ayub Amali kepada Bupati Kudus, Hartopo, di Kantor Perwakilan BPK Jateng, Semarang (Jumat, 21/05/2021).

Pada acara penyerahan opini WTP tersebut Hartopo didampingi oleh Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPPKAD. BPK Perwakilan Jateng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Brebes.

Kepala Perwakilan BPK Jateng mengatakan opini itu bukan merupakan hadiah dari BPK, tetapi hasil kerja keras pemerintah daerah dan koordinasi yang baik dengan DPRD di Kabupaten/Kota masing-masing. BPK mencatat masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti setiap daerah.

Permasalahan yang harus ditindaklanjuti setiap daerah meliputi aset tetap yang belum bersertifikat, pengamanan aset yang belum tercatat dan aset yang tidak ditemukan.

"Selain itu, seringkali terjadi permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan piutang yang tidak tertib meliputi piutang pajak dan retribusi, harap diperbaiki," ujarnya.

BPK mengucapkan selamat sekaligus memberikan apresiasinya atas capaian Kabupaten/Kota yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) khususnya Kabupaten Kudus yang meraih capaian sebanyak 9 kali berturut-turut.

Sementara itu, Bupati Hartopo mengatakan bahwa capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 9 kali telah ada ditangan Kabupaten Kudus. Untuk itu pihaknya berharap untuk dapat mempertahankan serta menambah kualitas kerja yang lebih baik.

Hartopo juga menekankan target peningkatan nilai dari capaian WTP diatas 90% ditahun depan. Pemkab akan terus memacu kinerja disetiap OPD terkait. "Kudus mendapatkan capaian nilai 89,67%, capaian kualitas harus ditingkatkan di atas 90%, mudah-mudahan tahun depan bisa semakin baik lagi dan melebihi target," ujarnya.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH